

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram yang berada di pulau Lombok. Sebagian besar dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah suku Sasak, sementara di bagian timur terdapat suku Bima dan Sumbawa yang merupakan kelompok etnis terbesar di pulau Sumbawa. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah tujuan wisata setelah Provinsi Bali, dimana Nusa Tenggara Barat sesungguhnya memiliki wilayah dan potensi yang luas serta Sumber Daya Alam yang kaya dan juga lapangan investasi yang cukup banyak. Akan tetapi masih perlu adanya strategi maupun upaya pemerintah memanfaatkan potensi wilayah untuk di kembangkan dengan menarik investasi maupun melakukan kerjasama.

Kemajuan teknologi informasi komunikasi telah mendorong globalisasi yang dimana terjadinya saling ketergantungan antar negara dan antar masalah yang semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) yang seolah-olah telah membentuk suatu *global village* bagi masyarakat dunia. Sejalan dengan proses globalisasi tersebut, para pelaku hubungan internasional juga semakin meluas dimana tidak hanya melingkupi negara (*state actors*) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara (*non-state actors*) seperti

organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, pemerintah daerah, kelompok-kelompok dan bahkan individu. Beragamnya aktor yang terlibat dalam Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks tetapi juga membuka peluang bagi pematangan diplomasi Indonesia.

Konstelasi hubungan antar negara dalam percaturan internasional era sekarang telah berubah dari pandangan isu “*state centric*” yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu – isu ekonomi yang lebih menguntungkan. Peran negara dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non-negara yang semakin eksis di dalamnya. Pandangan ini didasarkan dan dapat di lihat pada semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor non-negara terhadap interdependensi ekonomi.¹ Kondisi demikian memacu masyarakat negara untuk mengembangkan pola politik luar negerinya supaya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara secara lebih baik dan berkembang.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut, maka kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat

¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta. 1994. Hal. 232.

antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah untuk menjalin kerjasama dengan luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerjasama internasional telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi dengan diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini makin membuka kesempatan serta peran pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan dalam negeri umumnya dan daerah di luar negeri pada khususnya. Dengan melemahnya peranan aktor non-Negara, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka interaksi antar negara bukan lagi merupakan hubungan internasional melainkan sebagai hubungan transnasional yang melibatkan pemerintah lokal atau pemerintah daerah.

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (Negara – negara, organisasi internasional, kelompok – kelompok masyarakat yang berbeda bangsa dan lain sebagainya), termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi, serta dalam interaksi antara dua pihak, sumber daya aksi-aksi adalah kedua belah pihak tersebut.² Fredrick S. Dunn menyatakan bahwa hubungan internasional dapat dilihat sebagai suatu hubungan aktual yang melintasi batas negara.³ Interaksi internasional merupakan proses interaksi dan

² Lihat: Charles McClelland (terj: Hilman Adil). *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*. CV Rajawali. Jakarta. 1981. Hlm. 27.

³ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, jr., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Addison Wesley Educational Publisher inc., 1997. Hlm 18.

pertukaran antara aktor-aktor dalam sistem internasional yang relevan secara politis. Oleh karena itu interaksi internasional ini akan mencerminkan tujuan-tujuan, sumber-sumber daya, serta tindakan-tindakan dari aktor tersebut, dan akan dipengaruhi oleh konteks dan tindakan dimana interaksi internasional itu terjadi.⁴

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengembangkan potensi daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki jelas perlu secara otonom mengelola dan membuka peluang serta kesempatan kerjasama, dimana dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka peluang untuk menjajaki kerjasama dengan salah satu Pemerintah Provinsi di Negara Tiongkok yaitu Provinsi Zhejiang RRT. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebelumnya tidak pernah menjalin hubungan kerjasama dengan salah satu provinsi di Negara Tiongkok, dan baru kali ini menjalin kerjasama dan hubungan dalam bentuk kerjasama *Sister Province* dengan salah satu Provinsi di Negara Tiongkok yaitu dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang.

Dimulainya kerjasama yang di bangun oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT pada tahun 2014-2015, jelas tidak menutup kemungkinan adanya faktor pertimbangan serta hambatan dalam proses kerjasama tersebut. Sehingga alasan tersebut penulis mengangkat judul: “PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMPROV NTB MEMBANGUN KERJASAMA *SISTER PROVINCE* DENGAN PEMPROV ZHEJIANG RRT (2014-2015)”.

⁴ Brian Hocking dan Michael Smith, *World Politics: An Introduction to Intenational Relations*, Great Britain: Simon and Schuster Internasional, 1990, hlm. 216-217.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran dan pengamatan dengan adanya kerjasama antara pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang Republik Rakyat Tiongkok. Maka, Penulis ingin mengetahui : Mengapa Pemprov NTB Membangun Kerjasama *Sister Province* Dengan Pemprov Zhejiang RRT ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan yang di ambil oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat membangun kerjasama *sister province* dengan Provinsi Zhejiang RRT.
- b. Untuk mengetahui Hubungan kerjasama serta beberapa hambatan dalam proses kerjasama.
- c. Untuk memahami dan mengetahui kebijakan serta dinamika kerjasama keduanya dalam hubungan antar provinsi atau dalam bentuk *sister province*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari beberapa sisi yaitu :

- a. Secara Praktis, diharapkan bagi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Zhejiang sebagai sebuah lembaga pemerintah daerah dapat memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan pembangunan,

pertukaran informasi, kerjasama dan *Memorandum of Understanding* yang baik.

- b. Secara Akademik, diharapkan tesis ini dapat menjadi bahan telaah dan kajian yang lebih lanjut terhadap kajian *Sister Province* sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional dengan Provinsi (*sister province*), kabupaten/kota (*sister city*) di berbagai negara, dan juga mampu menjadi bahan acuan untuk membahas kerjasama antar pemerintah daerah yang lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam sub poin penelitian ini juga menggunakan tinjauan pustaka (*Literatur Review*) sebagai bahan referensi, pertimbangan, dan pengamatan yang berkaitan dengan Kerjasama *Sister province* Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT, dimana kerjasama antar daerah dalam suatu negara antara satu daerah dengan pihak luar negara. Kerjasama yang terjadi ini dapat terjalin antara pemerintah daerah dengan negara lain. Artinya bahwa hubungan kerjasama tidak harus selalu berupa hubungan antar negara, melainkan dapat pula berupa hubungan kerjasama antar kota, serta provinsi. Dalam hal ini bentuk kerjasama antar daerah menurut Permendagri No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri yaitu salah satunya seperti kerjasama *Sister Province*, *Sister City* maupun dalam hal investasi Asing. Adapun literatur review tersebut yaitu :

Stivani Ismawira Sinambela (2012) Tesis Magister Ilmu Hubungan Internasional dengan judul : "*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional*" (*Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang*). menjelaskan bahwa, hal wajib dalam kerjasama *sister city* antara Kota Medan dan Penang untuk selalu melihat Pemerintah Pusat Indonesia sebagai Pihak yang tidak boleh di lupakan dikarenakan Indonesia menerapkan sistem *One door Policy* yang mana sebuah realitas nasional yang harus disikapi dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Dalam realitas tersebut jelas merupakan peluang dan tantangan yang menjanjikan dengan memberi kesempatan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dalam mengambil langkah kebijakan yang konstruktif, efektif, efisien dan partisipasi aktif dalam memaksimalkan pengembangan potensi daerah yang dimilikinya.⁵ Secara aspek kerjasama Kota Medan dan Penang bukan merupakan kerjasama profit, melainkan non profit, artinya kerjasama kedua belah pihak tetap bertahan tanpa menyentuh ranah ekonomi dan investasi, melainkan karena adanya persamaan kebudayaan dan etnis masyarakat yang dimiliki kedua Kota yang dimana menjadikan kedua Kota lebih mengarah pada kerjasama *Twin City* yang mana kerjasama hanya untuk menguatkan persahabatan kedua Kota.

Tetapi tesis Stivani berbeda dengan yang penulis teliti, membahas tentang Proses Kerjasama *Sister Province* antara NTB dengan Zhejiang. Penulis menandakan dalam penelitian ini pada tahun

⁵ Stivani Iswara Sinambela, 2014," *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional Studi Kasus : Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang.*" Tesis Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2014-2015, dari awal proses serta rancangan keputusan sampai terjalannya kerjasama. Sedangkan penulis lebih memusatkan pada faktor pertimbangan pemprov NTB membangun kerjasama dengan RRT. kerjasama ini juga bersifat profit yang menyentuh arah ekonomi, budaya, dan, politik

Tonny Dian Effendy (2012) jurnal yang publikasikan oleh Universitas Pesantren Darul ‘Ulum (UNIPDU) dengan judul “*Enhancing Local Government International Competitive Advantage Through Entrepreneurial Government and Paradiplomacy Activities*”. Menjelaskan bahwa otonomi daerah membawa peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah ke ranah internasional melalui aktivitas Paradiplomasi. Namun permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan dan pengetahuan dalam menggunakan potensi daerah menjadi daya saing internasional. Maka diperlukan sebuah konsep yang di sebut dengan *entrepreneur government* yang mencoba mengubah paradigma dari *monolistic bureucratic govenrment menjadi entrepreneurial competitive government yang mengharuskan pemerintah daerah mengubah dirinya menjadi pemerintah daerah yang berorientasi kepada pelanggan (customer-driven government) dan bertanggung jawab (accountable government) kepada seluruh stakeholder-nya secara berimbang. Lebih lanjut Tonny menjelaskan bahwa melalui entrepreneur government maka akan terjadi sinergi segitiga antara pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi dimana pemda akan mampu memetakan, mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya yang*

*berdaya saing dalam prinsip kewirausahaan yang bertanggung jawab.*⁶

Perbedaan, bahwa melalui entrepreneur government yang mana dapat merubah paradigma dari kesatuan birokrasi pemerintah menjadi kewirausahaan kompetitif pemerintah, dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi dalam aktivitas paradiplomasi. Penulis fokus pada bagaimana memahami dan mengetahui dinamika kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang sebagai bentuk kerjasama paradiplomasi.

Christy Damayanti (2012) jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) dengan judul “*Transformasi, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*”. Dalam jurnal ini menyebutkan besarnya peranan para aparatur Daerah yang mengelola secara langsung kebijakan daerahnya dalam ranah dunia internasional, bahwasanya paradiplomasi sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah daerah dalam bidang hubungan luar negeri mutlak diperlukan seiring dengan diterimanya paham diplomasi multijalur (*multitrack diplomacy*) sebagai tuntunan riil kehidupan hubungan internasional dalam kemajuan globalisasi dan demokrasi.⁷

⁶ Tonny Dian Effendy, 2012, *Enhancing Local Government International Competitive Advantage Through Entrepreneurial Government and Paradiplomacy Activities*. UNIPDU. Vol 1, No. 2.

⁷ Christy Damayanti, 2012, *Transformasi Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*. UNISRI. Vol XIV, No. 22.

Perbedaan, membahas tentang potensi paradiplomasi yang merupakan faktor pendorong dalam kinerja diplomasi Indonesia. Lebih memfokuskan pada kesiapan Negara Indonesia menuju komunitas ASEAN yang merupakan bentuk kerjasama regional negara-negara di kawasan ASEAN melalui transformasi paradiplomasi, penerapan diplomasi multijalur yang juga dapat dianggap berpengaruh penting dalam dunia internasional melalui peran serta oleh pemerintah daerah. Penulis fokus membahas tentang praktik kerjasama dalam bentuk provinsi kembar '*Sister Province*' yang dibangun oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Provinsi Zhejiang yang merupakan bentuk dari praktik paradiplomasi itu sendiri, dan aspek apa yang mendorong pemerintah provinsi membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi Zhejiang.

Sidik Jatmika, dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, bahwa salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah seluas-luasnya adalah keinginan agar daerah diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan internasional. Hal ini merupakan bagian dari pertimbangan para pengambil keputusan dan merupakan salah satu jawaban dari tekanan yang berasal dari kejadian-kejadian eksternal dan desakan internal. Dimana kemudian otonomi daerah ini membawa peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan lingkungan eksternal yakni dunia internasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan kawasan.⁸

⁸ Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Perbedaan, cakupan lebih luas karena buku ini membahas tentang *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan internasional*, memandang otonomi dari kacamata hubungan internasional serta terdapat pembahasan tentang perbedaan antara politik luar negeri dengan Hubungan Internasional, fokus pada persoalan otonomi daerah serta hubungan luar negeri dan investasi asing. Menekankan pada bagaimana pola hubungan internasional yang bersifat transnasional, hal mana pemerintah daerah merupakan aktor pelaku baru dalam hubungan internasional. Tetapi penulis lebih fokus pada proses pengambilan keputusan yang di ambil serta persoalan bagaimana otonomi itu berjalan atau dijalankan dengan melakukan penelitan serta analisa terkait hubungan luar negeri yang dilakukan oleh daerah NTB. Dalam hal ini penulis banyak melakukan kutipan dalam buku tersebut karena relevan dengan apa yang penulis bahas dalam tesis ini.

Takdir Ali Mukti, buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, bahwa Hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupaun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama ‘kedaulatan’ suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan ‘share’ kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.⁹ Fokus pada kerjasama transnasional yang dilakukan oleh pemerintah lokal Korea dengan Pemerintah provinsi DIY.

⁹ Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press. Yogyakarta.

Perbedaannya penulis lebih menekankan pada persoalan dan pertimbangan serta faktor pendorong yang membuat Provinsi NTB membangun praktik kerjasama *sister province*.

Sebagai tambahan kajian pustaka dalam tesis ini, sebagai acuan dan bahan referensi, penulis juga menelaah tentang “Kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia”, yaitu kerjasama yang di laksanakan pemerintah Indonesia dengan Australia yang melibatkan pemerintah provinsi NTB.¹⁰ Kerjasama ini bertujuan untuk mempromosikan penghasilan pedesaan melalui dukungan untuk pasar dalam pertanian (AIP-PRISMA), adapun kerjasama ini di mulai pada 28 Oktober 2013 dan berlaku hingga 2017. Tujuan kesepakatan bersama para pihak bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan mendukung pengembangan kebutuhan Indonesia. Secara spesifik dari kerjasama ini adalah peningkatan 30% laba bersih dan 300.000 laki-laki dan perempuan petani kecil pada Juni 2017. Dalam kerjasama ini melibatkan Dinas Pertanian Provinsi NTB.

Perbedaannya, kerjasama tersebut berfokus pada kesepakatan bersama untuk peningkatan kebutuhan Indonesia dan untuk meningkatkan laba bersih, lebih lanjut dalam kerjasama ini hanya berfokus pada hal tersebut dan menitikberatkan pada dinas pertanian Provinsi NTB, sedangkan penulis, jangkauan yang di teliti meliputi beberapa elemen yang di kerjasamakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT.

¹⁰ Biro Kerjasama dan SDA SETDA NTB, dalam <http://birokerjasama.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2016/02/C.8.1.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2016.

Dari beberapa pendapat penulis diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuka kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dan mampu bersaing di dunia internasional. Namun peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri yang bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam membangun daerah, akan tetapi pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri, akan tetapi membawa nama pemerintah nasional dan untuk itu Negara tidak akan kehilangan nasionalnya.

Paradiplomasi merupakan alat penting dalam perkembangan kerjasama internasional antara pemerintah daerah dengan pihak asing untuk mempererat hubungan kerjasama. Hubungan antar pemerintah daerah dengan pihak asing saling memberi keuntungan satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah daerah dalam suatu negara demi mencapai kepentingan-kepentingan nasional di dunia internasional.

Studi praktik Paradiplomacy ini telah melengkapi pendapat Stefan Wolf bahwa Paradiplomacy ini mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh entitas ‘Sub-state’, atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.¹¹ Kemudian dari hal tersebut, maka pihak Pemda luar negeri

¹¹Stefan Wolf, Paradiplomacy: Ruang Lingkup, Peluang dan Tantangan. Jurnal. University of Nottingham. Hal. 1-2. Dalam <http://www.stefanwolff.com/working-papers/Paradiplomacy.pdf>. diakses tanggal 15 Januari 2016.

yang membuka peluang kerjasama dan juga memiliki persamaan baik dalam bidang pertanian, kelautan dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di negara Indonesia untuk bisa saling merangkul dan memajukan negara dan memenuhi kepentingan nasional masing-masing di arena internasional atau hubungan luar negeri.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Paradiplomasi

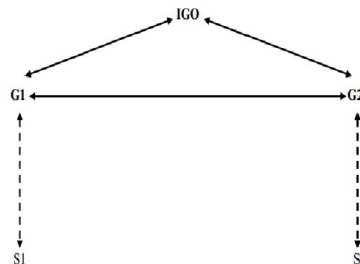
Dalam sebuah kerjasama antar negara yang meliputi Kerjasama internasional dimana terbentuk karena interaksi internasional yang meliputi bidang, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, kerjasama internasional dapat diartikan sebagai rangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Pengertian kerjasama internasional menurut Zartman (2010) adalah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang disepakati untuk menacapai tujuan bersama yang dilakukasn oleh aktor negara maupun non-negara, akibat dari adanya interaksi yang melewati batas-batas geografi suatu negara.

Menurut Holsti (1995) kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari suatu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggualangan masalah, melakukan tawar-menawar atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan suattu usul lainnya, dan mengakhiri pedundingan dengan sautu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.

Hubungan antar negara dalam dunia internasional telah mengalami perubahan. Seperti yang dikatakan oleh Mohtar Mas'ood (1994) konstelasi antar negara dalam percaturan internasional telah berubah dari pandangan isu “*state centric*” yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu-isu ekonomi yang lebih menguntungkan. Peran negara dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non-negara yang semakin eksis didalamnya. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor-aktor non-negara terhadap interdependensi ekonomi. Pola hubungan politik luar negeri yang bersifat “*state centric*” menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Jr digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pola Hubungan Politik Luar Negeri yang bersifat *state centric* Menurut Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Jr.¹²



Keterangan:

———— Hubungan Politik antar Negara

- - - - - Hubungan Politik dalam Negeri

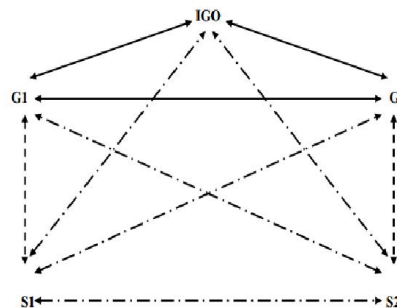
¹² Dikutif dari, Sidik Jatmika. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Bigraf Publishing. Yogyakarta. Hal 51.

- G = Government (Pemerintah)
 S = Society (Masyarakat)
 IGO = International Government Organization (Lembaga Internasional).

Keohane menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional yang tidak lagi bersifat *state centris*, namun sudah lebih bersifat transnasional dimana aktor-aktor non pemerintah sangat besar perannya dalam menciptakan hubungan antar bangsa.¹³ Dimana Hal tersebut tergambar pada skema berikut.

Tabel 1.2

Pola hubungan internasional yang bersifat transnasional menurut Joseph S. Nye Jr & Robert O. Keohane.¹⁴



Keterangan:

———— Hubungan Politik antar Negara

- - - - - Hubungan Politik dalam Negeri

- . - . - Hubungan Transnasional

G = Government (Pemerintah)

S = Society (Masyarakat)

¹³ Takdir Ali Mukti. 2013. Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia. Yogyakarta. Hal. 31.

¹⁴ Sidik Jatmika. Ibid., hal. 51.

IGO = International Government Organization (Lembaga Internasional).

Dalam pelaksanaan hubungan tersebut, dapat diketahui bahwa pola hubungan transnasional di atas memungkinkan aktor non-negara untuk dapat melakukan interaksi hubungan internasional. Masyarakat suatu negara dapat berhubungan langsung dengan masyarakat negara lain dan organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat melakukan hubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara melalui perantara pemerintah pusat, walaupun hal tersebut tidak begitu valid.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dimana munculnya isu-isu kompleks dalam hubungan internasional yang melewati batas-batas negara dan arus globalisasi yang semakin tidak mengenal ruang dan waktu melahirkan berbagai macam bentuk dan cara-cara diplomasi yang baru. Fenomena tersebut perlahan tapi pasti mulai menggantikan cara-cara diplomasi tradisional yang cenderung terlihat sangat kaku yang hanya dijalankan oleh sekelompok orang terlatih yang ditunjuk resmi oleh pemerintah suatu negara. Hal ini menjadi cikal bakal lahirnya diplomasi yang modern yang sangat fleksibel dan memunculkan berbagai macam aktor yang berperan didalamnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya letak geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memakmurkan dan meratakan pembangunan disegala bidang terhadap pulau dan kepulauan NKRI ditengah regionalisme yang terus berkembang. Sehingga, kebijakan desentralisasi oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan dan diyakini

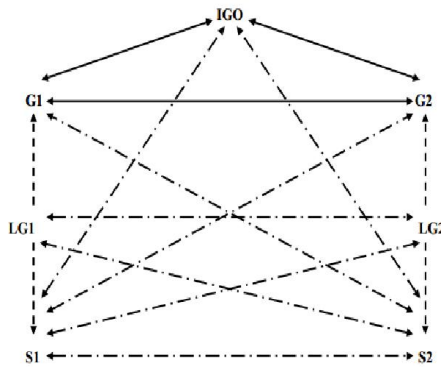
merupakan salah satu solusi yang efektif dan efisien untuk meratakan pembangunan di setiap daerah di kepulauan Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan desentralisasi yang ditetapkan oleh Indonesia adalah kebijakan otonomi daerah. Otonomi ini adalah salah satu bentuk pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah di setiap provinsi dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang teguh terhadap Undang-undang Dasar Negara yang sudah ditentukan. Dimana hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta efisien, dan berwibawa demi mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Munculnya “aktor baru” bernama pemerintah daerah (*local government*) mempengaruhi perkembangan model hubungan yang bersifat transnasional. Hal itu bisa digambarkan pada skema berikut:¹⁵

Tabel 1.3

Pola Hubungan Internasional yang bersifat transnasional yang melibatkan *Local Government* (Pemerintah Daerah) sebagai aktor dalam Hubungan Internasional.¹⁶

¹⁵ Sidik Jatmika. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Bigraf Publishing. Yogyakarta. Hal. 54

¹⁶ Ibid. 54.



Keterangan :

———— Hubungan politik antar negara

- - - - - Hubungan Politik dalam negeri

· - - - - Hubungan transnasional

G = Government (Pemerintah Pusat)

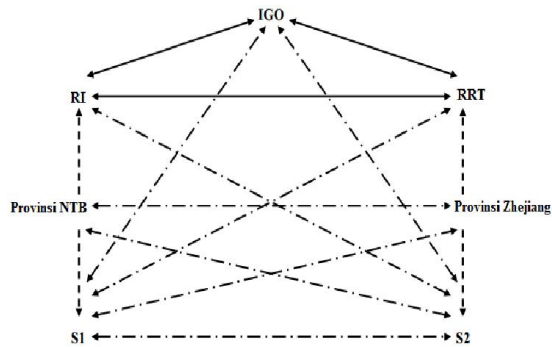
LG = Local Government (Pemerintah Daerah)

S = Society (Masyarakat), termasuk di dalamnya masyarakat bisnis.

IGO = International Government Organization (Lembaga Internasional).

Tabel 1.4

Aplikasi Teori Pola hubungan Internasional yang bersifat transnasional melibatkan *Local Government* (Pemerintah Daerah), yaitu Kerjasama *Sister Province* Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT.



Keterangan :

———— Hubungan Politik antar negara Indonesia dan Tiongkok

- - - - - Hubungan Politik Dalam Negeri

· - - · - - Hubungan Transnasional Provinsi NTB dengan Provinsi Zhejiang

RI = Government (Pemerintah Pusat Republik Indonesia)

RRT = Government (Pemerintah Pusat Republik Rakyat Tiongkok)

S = Society (Masyarakat), termasuk di dalamnya masyarakat bisnis.

IGO = International Government Organization (Lembaga Internasional).

Perkembangan situasi dunia, aktor dan teknologi informasi yang membuat arah diplomasi tradisional bergeser pada diplomasi yang lebih modern dan beragam. Saat ini dalam pendefinisian diplomasi terbagi menjadi dua bagian penting yaitu diplomasi tradisional atau diplomasi konvensional (first track diplomacy) atau diplomasi modern yang disebut diplomasi publik (second track diplomacy dan multitrack diplomacy/paradiplomacy). Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional.

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas 'sub-state', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.¹⁷ Istilah 'Paradiplomacy' pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah 'Parallel diplomacy' menjadi 'paradiplomacy'. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu pada makna 'the foreign policy of non-central governments'. Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek (1990) untuk konsep ini adalah 'micro-diplomacy'.¹⁸

Melihat kondisi politik internasional dan pola diplomasi yang berubah, pemerintah-pemerintah diseluruh dunia dituntut untuk merumuskan dan merancang rancangan kebijakan luar negeri yang disesuaikan dengan kondisi dunia internasional yang sedang mengalami globalisasi demi memelihara eksistensi dan peranannya dalam dunia internasional. Globalisasi yang terjadi menyebabkan terbukanya akses bagi masyarakat internasional untuk terlibat secara langsung dalam mempengaruhi dan memberikan sumbangsih terhadap dunia internasional. Disisi lain globalisasi turut melahirkan dan membesarkan aktor-aktor baru dalam dunia diplomasi diantaranya NGO, Multi National Cooperation (MNCs), epistemic community, media masa, individu, dan bahkan local govenrment dalam fenomena sister city. Hal

¹⁷ Keohane, Robert, Anne-Marie Slaughter, 'Legalized Dispute Relolution : Interstate and Transnational' International Organization 54, 3, hal. 457-460, The IO Foundation and Massachusetts Institute of Technology, Summers, USA. 2000.

¹⁸ Crikemans, David. 2008. 'Are the Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?', Hal. 34. Univercity of Anwerp and Flemish Centre for International Policy. Belgium. Dikutif oleh Takdir Ali. 2013. Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia. Yogyakarta hal. 38.

ini mengindikasikan dan menyebabkan dampak pada bergesernya peranan para diplomat-diplomat resmi yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Diplomasi telah mengalami banyak perubahan yang signifikan sejak konsep awal yang diperkenalkan di Eropa yang ditandai oleh Kongres Wina (1815). Faktor utama perkembangan diplomasi pada abad ke 19 terkait dengan pentingnya opini publik terhadap proses pengambilan keputusan oleh aktor-aktor pemerintah. Maka definisi diplomasi lama seperti yang dikemukakan oleh Sir Ernest Satow : “*The application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the government of the independent state*” telah mulai kehilangan relevansinya. Dimana definisi tersebut mengisyaratkan bahwa aktivitas diplomasi semata-mata dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah tanpa keterlibatan Masyarakat.¹⁹

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi membawa konsekuensi langsung pada praktik diplomasi internasional. Era ini di tandai dengan perubahan yang signifikan dalam teknologi telekomunikasi, sehingga eksklusivitas informasi tidak lagi menjadi dominan aktor-aktor diplomatik resmi pemerintah. Pada abad sekarang ini, dimana informasi telah merubah aktivitas diplomasi tidak lagi secara eksklusif di jalankan oleh aktor-aktor pemerintah atau diplomat resmi yang telah diberi wewenang penuh dalam menjalankan diplomasi. Selain merubah jenis aktivitas diplomasi, teknologi informasi juga memperkecil peran diplomat dan duta besar sehingga seringkali terjadi aktivitas “diplomat tanpa diplomat”. Harold

¹⁹ Sukawarsini Djelantik, 2008, Diplomasi antara Teori & Praktik, Graha Ilmu, Jakarta, hal. 58.

Nicholson mengatakan : “Perkembangan Teknologi komunikasi menyebabkan peran dan fungsi seorang Duta Besar semakin berkurang dan diplomat-diplomat merosot statusnya sebagai tenaga administrasi”.²⁰ Realitas baru hubungan diplomatik telah mengungkapkan pentingnya komunikasi dan informasi, dimana seorang Mantan Menlu Amerika Serikat (AS), George Shulz menegaskan bahwa : “Bahan baku Diplomasi adalah informasi; bagaimana memperolehnya, menganalisis, dan menempatkannya dalam sistem”.²¹ Perubahan fundamental dalam modal komunikasi akan membawa pengaruh yang mendalam dalam praktik berdiplomasi.

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas ‘*sub-state*’, pemerintah lokal/regional/pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan secara spesifik.²² Dalam hal ini sesuai dengan era dan fenomena yang begitu kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non negara di arena hubungan internasional. Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama dengan pihak-pihak yang berada di luar batas yurisdiksi negara. Konsep paradiplomasi yang dikemukakan oleh Panavotis Soldatos dan dikembangkan oleh Ivo Duchacek yang kemudian menjadi pendekatan

²⁰Harold Nicholson, *Diplomacy Then and Now*”, dalam *Theory and Practice of International Relations*, William C. Olson and Fred A. Sondermann, 2nd Edition, Prentice Hall, Englewood, NJ, 1974.

²¹ George P. Shulz: Keynote address from the Virtual Diplomacy Conference: “*The Information Revolution and International conflict Management*”, peaworks 18 September 1997. Lihat di http://www.usip.org/pubs/virtuall8/vdip_18.html. di akses pada 5 Januari 2016.

²² Wolf, Stefan, 2009, ‘Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges’, hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham.

yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan internasional oleh aktor sub nasional.

Duchacek menjelaskan paradiplomasi dalam tiga tipe yaitu: *Pertama, Transborder Paradiplomacy*. Menunjuk pada hubungan institusional, formal maupaun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis. Ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah. *Kedua, Transregional Paradiplomacy* yang mana hubungan diplomasi dilakukan oleh pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung, namun Negara dimana kedua pemerintahan sub nasional tersebut berada berbatasan langsung dalam satu kawasan. *Ketiga, Global Paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia.

Sementara itu, Soldatos (1990), secara fungsional atau berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi, membagi dua tipe paradiplomasi. *Pertama, Global Paradiplomacy*, dimana dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Sebagai contoh tipe paradiplomasi ini adalah kebijaksanaan yang di ambil oleh Gubernur New York dan Gubernur New Jersey yang melarang pendaratan pesawat-pesawat Uni Soviet di wilayahnya sebagai reaksi atas penembakan pesawat Korea Airlines. Mengingat pemerintah sub nasional biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi. *Kedua, Regional Paradiplomacy*, dimana dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Apabila isu-isu tersebut menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan

langsung disebutnya sebagai *microregional paradiplomacy*. Lazimnya *regional Paradiplomacy* ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah sehingga jarang menimbulkan kontroversi.

Dorongan bagi pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi dapat berasal dari lingkungan domestik baik dari negara maupun unit sub nasional itu sendiri, dan juga faktor-faktor eksternal/internasional. Faktor yang menjadi pendorong paradiplomasi meliputi:

1. Dorongan (upaya-upaya) segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografis, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub nasional tersebut berada maupun atas dasar persepsi (*perceptual segmentation* atau *electoralism*) yang meskipun terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.
2. Adanya ketidakseimbangan keterwakilan unit-unit sub nasional pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federate/sub-national units*).
3. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk “melakukan ekspansi” perannya.

Penetrasi internasional atau intervensi dari aktor-aktor eksternal dalam isu-isu domestik yang dimotivasi kepentingan strategis politik, ekonomi, sentimen budaya dan agama, serta interdependensi global dan regional (dalam kasus *transborder* dan *transregional paradiplomacy*)

dapat menjadi pendorong pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi. Interdependensi global khususnya antar negara industri maju membawa dampak ganda pada negara-negara berdaulat. Interdependensi telah membuka peluang adanya penetrasi kedaulatan dimana batas-batas teritorial negara tidak mampu lagi secara efektif membendung pengaruh-pengaruh eksternal di bidang ekonomi, budaya serta isu-isu politik tingkat rendah terhadap unit-unit sub nasional di wilayahnya. Pada sisi lain interdependensi global mendorong pemerintah nasional melakukan sentralisasi dalam kebijakan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya tahan dan daya saing. Namun hal ini justru menimbulkan reaksi balik dan resistensi dari unit-unit sub nasional yang tetap berkeinginan mempertahankan kepentingan dan perannya.

2. Decision Making Process

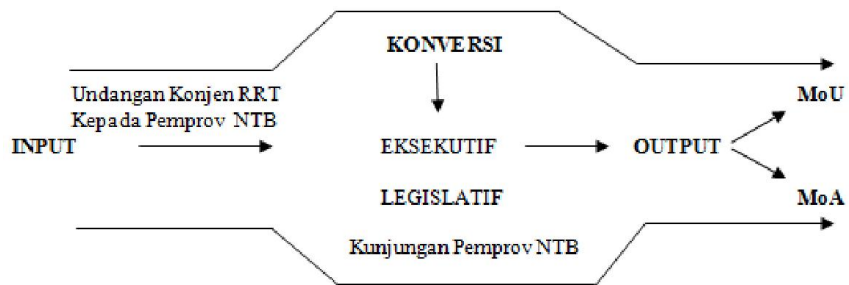
Meningkatnya isu-isu multilateral dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Hal ini kemudian membawa efek yang secara tidak langsung berdampak pada sistem pemerintahan dan kebijakan-kebijakan dalam negeri sebuah negara. Seperti yang ditulis oleh May dalam bukunya Studi Strategis mengutip James N. Rosenau menyatakan bahwa, dalam proses pengambilan keputusan, kejadian-kejadian eksternal dan tuntutan internal merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan para pengambil keputusan.

Berdasarkan uraian paragraf di atas, berikut penulis memaparkan definisi-definisi pengambilan keputusan oleh para pengambil keputusan : setiap kebijakan yang diambil oleh seorang penentu kebijakan tentu melewati proses pertimbangan, koordinasi, dan tentunya tenaga serta berpikir yang menjadi tolak ukur kebijakan

tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu karakter demokrasi untuk menentukan dan menetapkan sebuah kebijakan yang akan diterapkan dengan melihat koordinasi secara struktural dalam pemerintahan sebuah negara baik dalam level pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dianggap penting demi menjamin terus berlansungnya pemerintahan berdasarkan pada cara-cara demokrasi pancasila yang menjamin hak dan kebebasan setiap individu.

Tabel 1.5

Skema Proses kerjasama *Sister Province* dengan Zhejiang RRT



Proses pengambilan keputusan politik luar negeri merupakan suatu bentuk proses yang dimana negara melalui wakilnya melakukan atau menentukan pengambilan keputusan terhadap Kebijakan Luar Negeri yang dipilih dalam interaksi antar negara yang berlangsung dalam sistem internasional. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan seluruh perjalanan pemerintah baik itu dalam pengambilan keputusan maupaun segala bentuk interaksi untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Graham T. Alison

(1971) memaparkan proses pengambilan keputusan menjadi tiga model yaitu, Aktor rasional (*Rational actors*), Proses Organisasi (*Organizations Process*) dan Politik Birokratik (*Bureaucratic Politics of Foreign Policy Making*).²³

Dari tiga model yang di paparkan diatas, penulis dalam penelitian ini menggunakan Politik birokratik dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini yang di anggap paling tepat dengan pengambilan keputusan yang di bangun oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT, yang mana dapat analogikan bahwasanya setiap aktor baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berusaha menetapkan tujuannya. *Politik Birokrasi* : Politik Birokrasi (*Bureaucratic Politics of Foreign Policy Decision Making*) merupakan proses tawar-menawar antar pemerintah dengan agen pemerintah lainnya baik itu antar pemerintah negara maupun antar pemerintah daerah dengan pihak asing, baik pada program tukar menukar informasi pada sektor investasi, pariwisata smapai pada sektor pembangunan yang jelas sama-sama menguntungkan. Dimana proses tersebut merupakan proses saling mengemukakan alternatif untuk menetapkan kebijakan luar negeri.

Menurut Allison, terdapat dua elemen dalam politik birokrasi yaitu, Proses Organisasi dan Birokrasi (politik pemerintahan). Proses organisasi merupakan suatu pemerintah (government) yang berisi seperangkat organisasi pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintah. Dalam hal ini sebagian besar pekerjaan dalam organisasi-organisasi ini

²³ Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Engewood Cliffs, hal.5. dikutip dari Yayan Mochammad Yani, 2010, *perspektif-perspektif Politik Luar negeri dalam teori dan praktik*. UNPAD. Hal. 1

adalah pekerjaan rutin yang merujuk pada hasil keputusan sebelumnya dan terpaku pada *standard operating procedure*. Birokrasi politik merupakan model yang memusatkan perhatian terutama pada individu-individu yang ada dalam pemerintahannya dan interaksi diantara mereka, sebagaimana penentuan tindakan suatu pemerintahan dalam politik internasional. Ide sentral birokrasi adalah keputusan-keputusan yang di buat pemerintah yang merupakan hasil dari suatu elaborasi permainan politik. Model ini menekankan pada peranan atau aturan (*roles*) yang di lakukan banyak birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri serta dalam membangun kerjasama luar negeri, dan tidak memfokuskan perhatiannya hanya pada pusat pembuatan keputusan politik luar negeri suatu negara. Dengan demikian, para birokrat memiliki banyak pengaruh dalam merumuskan dan memutuskan politik luar negeri. Para birokrat juga bertanggungjawab pada pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan sehingga mereka dapat mempengaruhi implementasi politik luar negerinya.²⁴

F. Hipotesis

Keputusan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Membangun Kerjasama dengan Pemprov Zhejiang :

1. Memiliki persamaan dalam bidang pengelolaan pertanian, dimana Provinsi Zhejiang yang dikenal dengan sebutan provinsi beras.
2. Persamaan di bidang kelautan seperti perikanan, provinsi Zhejiang merupakan provinsi yang saat ini dijadikan sebagai

²⁴ Op. Cit., Yayan Mochamad Yani, 2010. *Perspekti-perspektif Politik Luar Negeri Dalam Teori dan Praksis*. UNPAD. Hal. 6

provinsi percontohan produk kelautan dan pusat perdagangan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

3. Penghidupan masyarakat di kedua provinsi tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan serta nelayan.
4. Pertimbangan pemerintah provinsi NTB bahwa saat ini sangat membutuhkan investasi diberbagai bidang, baik itu bidang kelistrikan, pabrik pengolahan rumput laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Global Hub, Samota, Mandalika dan Teluk Bima.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta kerjasama *Sister Province* pemprov Nusa Tenggara Barat dengan Pemprov Zhejiang Tiongkok dengan menitikberatkan pada faktor pertimbangan serta Proses Pengambilan keputusan yang dibangun oleh pemerintah Pemprov NTB menjalin kerjasama *sister province* antar provinsi serta beberapa hambatan yang dihadapi kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama tersebut.

2. Lokasi Penelitian dan Jangkauan Penelitian

Untuk mengarah ke pembahasan yang lebih tepat dan sistematis maka lokasi penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan dengan mengamati penataan dan bentuk Kerjasama Internasional oleh pemerintah daerah/provinsi NTB dalam kerjasama *Sister Province* yang

dilakukan dengan Pemrprov Zhenjiang Tiongkok. Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2014 sampai 2015. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Biro Kerjasama dan SDA Sekertariat Daerah Provinsi NTB serta SKPD terkait.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang berdasarkan aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Akan tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan studi lapangan yaitu observasi ataupun wawancara.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan telaah pustaka (*liberary research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas dan kemudian menganalisa. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar baik itu media cetak maupun elektronik dan dari situs-situs internet maupun laporan-

laporan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam hal ini menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validasi data informan yang memeberikan informasi dalam penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya melalui sumber-sumber data berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupaun dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai keputusan Pemprov NTB menjalin kerjasama. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Arsip

Arsip yang akan diteliti dalam penulisan ini meliputi arsip yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTB secara resmi mengenai kerjasama dengan Permerintah Provinsi Zhejiang yang di publikasikan baik melalui media cetak maupun media elektronik yang menjadi arsip MoU kerjasama antar kedua provinsi.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan terhadap berbagai peristiwa-peristiwa yang menjadi acuan pertimbangan serta pengambilan keputusan Pemprov NTB dalam menjalin dan mengimplementasikan program-program kerjasama *Sister province* antara Pemprov NTB dan Pemprov Zhejiang Tiongkok.

d. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan wawancara melalui *face to face*, dan *via email* lewat internet jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu: BAB I, Berupa Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II, Membahas Kerjasama *Sister Province* Pemprov NTB dan Pemprov Zhenjiang. Menggambarkan kerjasama internasional dalam bentuk *sister province* yang di bangun oleh Pemprov NTB dengan Zhejiang RRT.

BAB III. Membahas Keputusan Pemerintah provinsi NTB membangun kerjasama *sister province* dengan zhejiang RRT. Mendeskripsikan mengenai keputusan Pemerintah NTB membangun kerjasama dengan provinsi Zhejiang RRT.

BAB IV. Membahas Hambatan kerjasama *sister province* NTB-Zhejiang. Bab ini menguraikan tentang habatan yang dihadapi oleh pemprov NTB dalam membangun kerjasama.

BAB V, Kesimpulan. Bab ini akan menyimpulkan tentang penjelasan secara ringkas dari pembahasan penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.